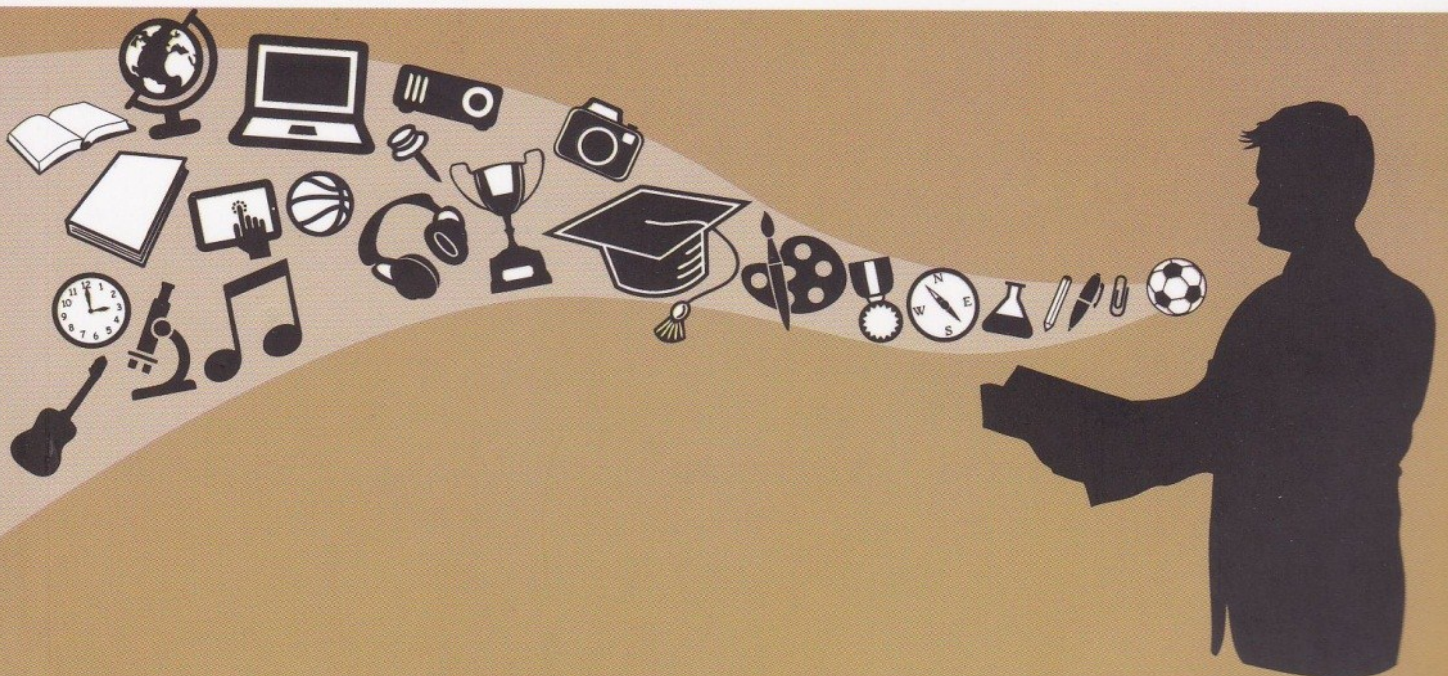


Dr. Iskandar Agung, M.Si, dkk



MENGEMBANGKAN PROFESIONALITAS GURU

Upaya Meningkatkan Kompetensi dan
Profesionalisme Kinerja Guru





IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKSELERASI KEMAJUAN PENDIDIKAN DI DAERAH (Antara Idea dan Realita)

Oleh: Hardiyansyah
Universitas Bina Darma, Palembang
hardi1966@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah telah mengubah berbagai bentuk kebijakan pembangunan di daerah, termasuk pembangunan bidang pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah. Setelah lebih dari satu dasawarsa otonomi daerah digulirkan, banyak dampak yang ditimbulkan, baik dampak positif maupun dampak

negatifnya. Pada bidang pendidikan misalnya, semula kewenangan pengelolaan pendidikan menengah (SMP/SLTA) di tingkat Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di ibukota provinsi. Mulai dari rekrutmen/penerimaan guru SMP/SMA/SMK, mutasi (pemindahan) guru, hingga promosi jabatan sebagai wakil/kepala sekolah merupakan kewenangan Kantor Wilayah. Menurut Lasmawan (2003:3), berdasarkan analisis empirikal dan konseptual, tampaknya banyak kebijakan pendidikan selama ini yang salah sasaran atau terlalu dipaksakan demi kepentingan-kepentingan politis tertentu.

Sejak otonomi daerah, sesuai dengan tuntutan undang-undang, semua kewenangan pengelolaan pendidikan, diserahkan kepada pemerintah daerah melalui kepala daerah (bupati/walikota), dan bahkan kewenangan kepala daerah terhadap pendidikan dasar dan menengah lebih besar dari kewenangan sebelum otonomi daerah. Belakangan kewenangan yang sangat besar tersebut banyak menimbulkan persoalan dan masalah, mulai dari masalah rekrutmen guru yang sarat dengan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), pengangkatan guru honor yang tidak ada standar khusus, promosi jabatan wakil/kepala sekolah yang bernuansa politis, hingga pada pendistribusian dan pemerataan guru antar daerah yang tidak proporsional dan profesional.

